

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas

Sindo

Tempo

Indopos

Pos Kota

Warta Kota

SANITASI

Sistem Toilet Buruk, Limbah Dibuang ke Kali

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 166,2 miliar untuk membangun tangki septik. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan warga yang masih buang air besar sembarangan.

Pembangunan tangki septik masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD DKI 2020.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf, Senin (7/10/2019), mengatakan, sistem pengelolaan air limbah domestik dibangun di 30 lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Lokasi diprioritaskan di daerah yang sebagian warganya buang air besar sembarangan (BABS) ke kali. "Kami utamakan supaya mereka enggak buang air limbahnya ke kali. Kami akan buatkan tangki septik komunal."

Menurut Juaini, tangki sep-

tik komunal ini mendesak karena menyangkut sanitasi lingkungan dan kesehatan warga. BABS bisa menjadi sumber penyakit bagi warga lain.

Selain Dinas SDA, dalam dokumen KUA PPAS 2020, DKI juga mengalokasikan belanja subsidi Rp 10 miliar untuk rehabilitasi tangki septik. Subsidi diberikan kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan bagi masyarakat (*public service obligation/PSO*).

Andalkan toilet umum

Kebiasaan BABS terjadi lanjutan tak tersedia toilet di setiap rumah. Warga pun mengandalkan toilet umum. Sayangnya, banyak saluran toilet umum itu langsung ke kali.

Sebagian warga Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, misalnya, masih bergantung pada toilet umum.

Eneng (35), warga RT 006 RW 007 Tanjung Duren, mengaku terbiasa buang air kecil dan mencuci di toilet umum karena saluran air rumah kerap mati.

Kondisi serupa terjadi di RT 015 RW 007 Tanjung Duren. Sedikitnya, kata Ketua RT 015 Sitanggang, 20 warga masih bergantung toilet umum. Padahal, saluran pembuangan toilet itu langsung ke kali terdekat.

Di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, saluran dari toilet juga mengalir ke sungai. Sungai itu juga menjadi tempat nelayan menyandarkan kapalkapal mereka.

Tarsim (70), warga Kampung Nelayan Cilincing, mengatakan, ia tidak memiliki toilet. Untuk buang hajat, mereka memanfaatkan toilet umum. "Enggak mungkin buat toilet. Lahan di sini sempit. Saya mau rehab rumah saja tidak bisa, apalagi bangun toilet. Jadi, terpaksa *num pang* di toilet umum. Satu kali

pakai bayar Rp 2.000," ujarnya.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, baru 4,2 persen rumah di Jakarta yang terlayani sistem pembuangan limbah domestik melalui perpipaan. Limbah itu lalu diolah di kawasan pengolahan.

"Sebagian permukiman padat sudah menggunakan tangki septik komunal. Sementara sisanya membuang hajat langsung ke kali," kata Firdaus.

Idealnya, limbah domestik di Ibu Kota terhubung dengan sistem perpipaan. Kemudian pipa itu menyalurkan limbah ke instalasi pengolahan limbah.

Menurut Firdaus, sistem perpipaan masuk dalam Proyek Jakarta Sewerage System. Tujuannya, memastikan air limbah domestik diolah di sistem komunal dan hasil olahan dibuang sehingga tidak mencemari air.

(DAN/DIV/BOW/VAN)